

# KPK

## Komisi Pemberantasan Korupsi

**Surabaya-** Upaya yang dilakukan pemerintah kota Surabaya dalam sistem pelayanan publik membuahkan hasil. Dari 22 kota se-Indonesia Kota Surabaya terpilih menjadi yang terbaik dalam sektor pelayanan publik. Itu disampaikan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Eko S Tjiptadi Choirul setelah rapat evaluasi supervisi pelayanan publik di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, (17/3/2011).

"Dalam versi KPK dari 22 kota yang disurvei dalam konteks pelayanan publik Kota Surabaya menjadi yang terbaik dan menempati urutan pertama dengan nilai 6,13. Pelayanan publik kedua terbaik ditempati Samarinda. Kota Medan yang terburuk pelayanan publiknya dengan nilai 3-an, " ungkap Eko tambahannya.

Eko juga menjelaskan berdasarkan pantauan KPK, upaya perbaikan pelayanan publik Pemprov Jatim sudah terlihat perbaikan secara signifikan, bila dibanding tahun-tahun sebelumnya. "Pelayanan publik di Jatim jauh lebih bagus. Salah satunya adalah pelayanan publik yang dilakukan Polrestabes Surabaya," ungkap Eko. Polrestabes Surabaya dipuji, lanjut dia, terkait sejumlah layanannya. Mulai layanan one-day service pembuatan SIM, SIM Delivery, SIM keliling di Polrestabes Surabaya dilakukan dengan cepat.

## **KPK: Surabaya Terpilih Menjadi Yang Terbaik Dalam Pelayanan Publik**

Ditulis oleh Dispendukcapil

Jumat, 04 November 2011 13:09 - Terakhir Diperbaharui Senin, 07 November 2011 08:43

---

Selain Polrestabes Surabaya, Institusi lain yang layanan publiknya meningkat juga terjadi di Dinas Perhubungan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Selain pujian-pujian Eko juga memberikan kritik atas kinerja layanan publik yang kurang baik di beberapa instansi, karena masih ditemukan sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Beberapa instansi itu diantaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Kantor Imigrasi Tanjung Perak dan Inspektorat Kota Surabaya.

"Instansi-Instansi tersebut terdapat pemohon yang dipersulit dan diperlama proses permohonannya dan dimintai uang pembayaran lebih dari yang seharusnya," jelasnya.(TiK/\*)

Sumber :beranda Kota